

Ringkasan Eksekutif

Strategi Pemerataan Akses Kartu Program Indonesia Pintar (KIP-K) di Perguruan Tinggi Swasta

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan instrumen strategis yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah. Namun, dalam implementasinya, distribusi kuota KIP-K yang relatif lebih dominan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berpotensi membatasi daya jangkauan program terhadap kelompok sasaran utama. Kondisi ini menjadi krusial mengingat PTS merupakan penyerap terbesar permintaan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa dari wilayah non-perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ketimpangan tersebut tidak hanya tercermin pada alokasi kuota, tetapi juga pada perbedaan mekanisme penetapan penerima, linimasa pencairan dana, serta strategi sosialisasi program yang belum sepenuhnya afirmatif dan inklusif bagi calon mahasiswa PTS. Akibatnya, calon mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi dan capaian akademik yang relatif rendah menghadapi hambatan struktural untuk mengakses Program KIP-K melalui jalur PTS. *Policy paper* ini disusun menggunakan metode Delphi yang melibatkan 40 panelis lintas pemangku kepentingan melalui dua putaran kuesioner untuk mencapai konsensus mengenai tantangan implementasi dan alternatif kebijakan yang paling relevan.

Berdasarkan hasil studi Delphi, *policy paper* ini merekomendasikan dua alternatif kebijakan. Alternatif pertama menekankan perbaikan desain kebijakan melalui revisi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022, khususnya dalam penyusunan kriteria alokasi kuota yang lebih inklusif, penyelarasan linimasa implementasi antara PTN dan PTS, serta penguatan akuntabilitas program. Keberhasilan kebijakan ini diukur melalui peningkatan proporsi PTS, khususnya di wilayah 3T, yang menerima kuota KIP-K, serta meningkatnya kesesuaian antara kuota dan jumlah pendaftar yang memenuhi kriteria eligibilitas di PTS.

Alternatif kedua berfokus pada penguatan strategi sosialisasi Program KIP-K dengan menegaskan karakter afirmatif beasiswa dan keterbukaannya bagi PTS melalui optimalisasi kanal digital dan sosialisasi luring di wilayah 3T. Keberhasilan kebijakan ini diukur melalui peningkatan proporsi pendaftar yang memilih jalur PTS serta peningkatan performa konten media sosial. Secara kumulatif, kedua alternatif kebijakan diharapkan dapat memperluas akses Program KIP-K di PTS dan meningkatkan penyerapan mahasiswa dari kelompok rentan.